

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tenaga kerja kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk menunjang tugas tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang kesehatan. Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar profesi dan kebutuhan pelayanan. Salah satu instrumen penting dalam upaya ini adalah melalui pelatihan yang terstruktur dan terstandarisasi. Pelatihan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kompetensi individu, kinerja organisasi, dan pada akhirnya, kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Pelatihan yang efektif tidak hanya bergantung pada materi yang disampaikan, tetapi juga pada bagaimana pelatihan tersebut dirancang dan dilaksanakan. Peran penting tenaga kesehatan ditegaskan dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Sehubungan peran penting tenaga kesehatan diatas, maka penyelenggaraan upaya kesehatan haruslah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian, dan

kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya. Di sinilah pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelatihan, yang bertujuan untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan efektivitas proses pembelajaran. SOP menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelatihan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Fenomena terkini di Indonesia menunjukkan adanya sorotan terhadap pentingnya standarisasi pelatihan tenaga kerja kesehatan. Baru-baru ini, isu mengenai kualitas dan efektivitas pelatihan menjadi perhatian, terutama dalam menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks dan dinamis. Kesenjangan antara kompetensi yang diharapkan dengan kompetensi aktual tenaga kesehatan di lapangan masih menjadi persoalan. Selain itu, belum semua institusi penyelenggara pelatihan memiliki SOP yang komprehensif dan diimplementasikan secara konsisten. Hal ini berpotensi menyebabkan variasi dalam kualitas lulusan pelatihan dan berdampak pada mutu pelayanan kesehatan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelatihan juga semakin menguat. Masyarakat dan pemerintah mengharapkan adanya mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa investasi dalam pelatihan tenaga kesehatan memberikan hasil yang optimal.

Kualitas pelayanan kesehatan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Di Indonesia, upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terus menjadi fokus utama pemerintah, termasuk melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja kesehatan. Tenaga kerja kesehatan, sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan, memegang peranan krusial dalam keberhasilan sistem kesehatan secara

keseluruhan. Kompetensi yang memadai dan terkini menjadi esensial untuk memastikan pelayanan yang aman, efektif, dan berorientasi pada pasien.

Provinsi Sumatera Barat, sebagai salah satu wilayah dengan dinamika perkembangan kesehatan yang signifikan, juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas tenaga kerja kesehatannya. Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar profesi dan kebutuhan pelayanan. Salah satu instrumen penting dalam upaya ini adalah melalui pelatihan yang terstruktur dan terstandarisasi. Pelatihan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kompetensi individu, kinerja organisasi, dan pada akhirnya, kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Provinsi Sumatera Barat, sebagai salah satu wilayah dengan dinamika perkembangan kesehatan yang signifikan, juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas tenaga kerja kesehatannya.

Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan adalah melalui kegiatan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan (BKOM-Pelkes) Sumatera Barat sebagai unit pelaksana teknis daerah di bidang pengembangan kompetensi tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan yang bermutu. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja kesehatan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja kesehatan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan (BKOM- Pelkes) Sumatera Barat sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam

pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan, memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa tenaga kerja kesehatan memiliki kompetensi yang memadai. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya pelatihan, masih terdapat tantangan dalam penerapan standar operasional yang efektif. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan menerapkan standar operasional pelatihan yang sesuai agar tenaga kerja kesehatan dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

UPTD BKOM PELKES Sumatera Barat sebagai unit pelaksana teknis daerah di bidang pengembangan kompetensi tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan yang bermutu. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan SOP pelatihan, seperti ketidaksesuaian pelaksanaan dengan prosedur yang telah ditetapkan, kurangnya sosialisasi SOP kepada seluruh pihak terkait, serta keterbatasan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai **“Penerapan standar operasional pelatihan kepada tenaga kerja kesehatan di UPTD BKOM PELKES Sumatera Barat”**. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana penerapan SOP telah berjalan, hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana penerapan standar operasional pelatihan kepada tenaga kerja kesehatan di UPTD BKOM PELKES Sumatera Barat?
- b. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan standar operasional pelatihan di UPTD BKOM PELKES Sumatera Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mendeskripsikan penerapan Standar Operasional Pelatihan (SOP) kepada tenaga kerja kesehatan di UPTD BKOM PELKES Sumatera Barat.
- b. Untuk Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Standar Operasional Pelatihan (SOP) di UPTD BKOM PELKES Sumatera Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi penulis:**

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kesehatan.
- b. Mengembangkan kemampuan analitis dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan SOP di lingkungan kerja nyata.
- c. Menjadi sarana penerapan ilmu teoritis ke dalam praktik empiris, sebagai bentuk integrasi antara pembelajaran akademik dan realitas lapangan.
- d. Meningkatkan kompetensi penulis dalam bidang manajemen pelatihan kesehatan, yang bermanfaat sebagai bekal profesional di masa mendatang.

#### **1.4.2 Bagi UPTD BKOM PELKES Sumatera Barat:**

- a. Evaluasi Implementasi SOP: Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana Standar Operasional Pelatihan (SOP) telah diterapkan di UPTD BKOM PELKES Sumatera Barat, termasuk mengidentifikasi area yang sudah berjalan baik dan area yang memerlukan perbaikan.
- b. Identifikasi Hambatan: Penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi dalam penerapan SOP pelatihan, sehingga pihak UPTD dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut.
- c. Dasar Pengambilan Keputusan: Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga bagi manajemen UPTD BKOM PELKES Sumatera Barat dalam menyusun kebijakan dan program untuk mengoptimalkan penerapan SOP pelatihan di masa depan.
- d. Peningkatan Kualitas Pelatihan: Dengan penerapan SOP yang optimal, diharapkan kualitas pelatihan tenaga kerja kesehatan di UPTD BKOM PELKES Sumatera Barat dapat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan.

#### **1.4.3 Bagi Universitas:**

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia kesehatan, khususnya terkait dengan penerapan standar operasional pelatihan.

- b. Referensi Penelitian Selanjutnya: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan teoretis bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik serupa dengan lingkup yang lebih luas atau fokus yang berbeda.
- c. Penambahan Literatur: Tugas akhir ini akan menambah khazanah literatur ilmiah terkait manajemen pelatihan tenaga kerja kesehatan di Indonesia, khususnya di konteks UPTD BKOM PELKES Sumatera Barat.
- d. Aplikasi Teori: Penelitian ini akan mengaplikasikan teori-teori manajemen sumber daya manusia, manajemen pelatihan, dan standar operasional prosedur dalam konteks praktis di organisasi pelayanan kesehatan.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Objek Penulisan**

Objek dalam penulisan tugas akhir ini adalah mengenai penerapan standar operasional pelatihan kepada tenaga kerja kesehatan di UPTD BKOM PELKES Sumatera Barat. Penulis melakukan penulisan langsung pada UPTD Bkom Pelkes dan melakukan komunikasi langsung dengan pegawai dan atasan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi terkait dengan penerapan standar operasional proses pada perusahaan tersebut.

### **1.5.2 Metode penulisan**

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif / kuantitatif, yaitu metode yang mendeskripsikan atau menggambarkan fakta yang nyata dengan keadaan yang terjadi.

#### **Jenis Data**

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang di peroleh dari wawancara di lingkung UPTD Bkom Dan Pelkes.

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, arsip data, dan jurnal jurnal penelitian.

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

a. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa referensi buku yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam ruang lingkup masalah ini.

b. Teknik Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada staf pekerja atau pejabat berwenang mengenai penelitian yang edang dilakukan.

### **1.6 Sistematika Penulisan Laporan**

Penulisan proposal ini akan dibagi atas IV (Empat) bab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

#### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Sebagai pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan laporan.

**2. BAB II: LANDASAN TEORI**

**3. BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN  
PEMBAHASAN**

**4. BAB IV: PENUTUP**